

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan (Wikipedia). Senada dengan pengertian sebelumnya, Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN mendeskripsikan kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan merupakan masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan, banyak masyarakat di Indonesia hidup didalam kemiskinan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, seperti pemberian subsidi kepada masyarakat miskin. Subsidi tersebut biasa berbentuk program-program pemerintah yang bersifat langsung menyentuh masyarakat kelas bawah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Beras Miskin

(Raskin). Program-program tersebut hanya sebagian dari program-program yang pemerintah luncurkan untuk membantu masyarakat dalam melawan kemiskinan. Tetapi harus disadari untuk membentuk suatu bangsa yang maju tidak hanya di lihat dari aspek sosial saja, tetapi masih ada aspek yang menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa dikatakan maju. Salah satunya pendidikan, pendidikan sangat erat hubungannya dalam membangun suatu bangsa yang maju. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan hal yang sangat berperan bagi membentuk sumber daya manusia unggul yang akan memajukan bangsa tersebut. Sumber daya manusia yang unggul diharapkan dapat mengolah sumber daya yang lain dengan efektif sehingga hasil pengolahannya dapat optimal.

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah meluncurkan program-program yang diharapkan dapat membangun generasi yang unggul, melalui-program-program tersebut pemerintah berharap masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satunya program pemerintah yang diharapkan dapat membantu siswa-siswanya dalam bidang pendidikan adalah program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program BSM merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih berusia dini putus sekolah dikarenakan kesulitan biaya.

Program BSM sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah pada usia dini. Hal ini disebabkan oleh keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa

tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk berkerja. Masalah inilah yang sebenarnya ingin dipecahkan oleh pemerintah agar siswa yang berasal dari keluarga miskin dapat menyelesaikan sekolahnya dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program BSM diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud), selanjutnya diteruskan kemasyarakat melalui Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi dan Kabupaten. Program BSM seterusnya dilaksanakan oleh implementor langsung yaitu sekolah untuk melaksanakan penyaluran dana program BSM ini. Dana Program BSM diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Program BSM dilaksanakan diseluruh nusantara demi pemerataan pendidikan yang menjadi tujuan Kemendikbud salah satunya Kabupaten Sambas yang terletak di ujung Provinsi Kalimantan barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Dalam melihat tinggi rendahnya sumber daya manusia suatu daerah, kita dapat melihat Indeks Pembangunan Manusia daerah tersebut. IPM merupakan Indeks yang mencakup beberapa aspek kehidupan masyarakat meliputi : Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya IPM diharapkan pemerintah dapat melihat kekurangan suatu daerah dan akan meningkatkan pembangunan didaerah tersebut. Untuk melihat tingkat IPM masyarakat Kabupaten Sambas dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1.1
Tingkat IPM Kalbar tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	IPM Tahun 2012	Peringkat
1	Kota Pontianak	74,01	1
2	Kabupaten Kapuas Hulu	70,95	2
3	Kota Singkawang	69,77	3
4	Kabupaten Pontianak/ Mempawah	69,63	4
5	Kabupaten Melawi	69,57	5
6	Kabupaten Sanggau	69,53	6
7	Kabupaten Sintang	69,32	7
8	Kabupaten Ketapang	69,19	8
9	Kabupaten Landak	68,71	9
10	Kabupaten Bengkayang	68,53	11
11	Kabupaten Kuburaya	68,62	10
12	Kabupaten Sekadau	68,07	12
13	Kabupaten Kayong Utara	66,29	14
14	Kabupaten Sambas	66,33	13

Sumber: <http://bps.go.id>

Dari tabel diatas dapat dilihat kabupaten Sambas merupakan kabupaten dengan tingkat IPM yang paling rendah kedua dengan IPM 66,33 pada tahun 2012 diatas kabupaten Kayong Utara. Tetapi jika dihitung dengan rata-rata IPM se Kalimantan Barat dari tahun 2008-20012, kabupaten sambas menduduki peringkat terbawah dengan rata-rata 65,05. Salah satu penyebabnya adalah rata-rata lama sekolah di kabupaten Sambas hanya 5,94. Maka dari itu penulis menilai Kabupaten

Sambas layak untuk mendapatkan bantuan program BSM untuk mengurangi angka putus sekolah.

Di kabupaten Sambas, rata-rata lama sekolah adalah 5,94 angka ini menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Sambas putus sekolah pada kelas 5 Sekolah dasar (SD). Program BSM sangat diperlukan bagi siswa tidak mampu pada tingkat SD sebagai pendorong siswa dari keluarga miskin untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.

Didalam surat Kemendikbud Nomor: 1154/C2/TU/2013 tentang kuota BSM SD APBN-P Untuk keseluruhannya kabupaten Sambas mendapatkan kuota penerima BSM sebesar 14.415 hanya untuk tingkat sekolah dasar diseluruh Kabupaten Sambas. Dari 30 jumlah SD negeri dan SD swasta yang ada di kecamatan Sambas terdapat 1817 siswa yang terdata sebagai siswa miskin yang berhak menerima dana bantuan program BSM. Setiap siswa akan menerima dana bantuan sebesar Rp.425.000.

SDN No 12 Sungai Pinang dan SDN No.20 Kampung Lorong adalah sekolah yang mendapat kuota penerima terbanyak di kecamatan Sambas. SDN No. 16 Saing rambi juga mendapat lebih banyak kuota dari sekolah-sekolah lain yang ada di kecamatan Sambas. Dari ketiga SDN tersebut terdapat 586 siswa miskin yang terdata sebagai penerima dana bantuan program BSM.

Dalam penerapan program yang diluncurkan pastinya pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau program menginginkan kebijakan atau program yang diluncurkannya dapat berjalan dengan baik dan efektif sehingga dapat memecahkan masalah yang menjadi awal pembuatan kebijakan atau program tersebut. Tetapi dalam penerapannya tidak dapat dipungkiri masih terdapat kekurangan walaupun sedikit. Kerurangan tersebut dapat disebabkan oleh faktor *internal* (dalam) maupun *eksternal* (luar) faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam penerapan suatu kebijakan atau program. Faktor *internal* (dalam) merupakan faktor yang berasal dari orang atau lembaga yang menerapkan kebijakan tersebut sedangkan faktor *eksternal* (luar) merupakan faktor yang berasal dari luar orang atau lembaga yang menerapkan kebijakan tersebut.

Begitu juga program BSM dilaksanakan atau diterapkan, pastilah terdapat kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam implementasi program ini. Baik dari implementor yang menjalankan program ini maupun dari luar. Salah satu faktor dari dalam yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang ada pada implementor. Sedangkan faktor dari luar semisal dari lingkungan tempat program itu diimplementasikan. Penulis menangkap beberapa fenomena yang terjadi dalam penerapan BSM yang dilaksanakan Dinas pendidikan Kabupaten Sambas khususnya di Kecamatan Sambas yang dilakukan oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sambas.

Fenomena-fenomena yang terjadi salah satunya adalah masih ada terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana BSM serta

masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana BSM ini. padahal sejatinya pemerintah meluncurkan program ini untuk membantu siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Adapun fungsi dari dana BSM yaitu untuk membeli keperluan sekolah siswa-siswa seperti buku dan seragam serta biaya lainnya yang masih menyangkut masalah pendidikan anak.

Masalah lainnya yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang untuk dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa tersebut. Otomatis dana tersebut di kelola oleh orang tua siswa dan pihak sekolah sebagai implementor cukup sulit melakukan pengawasan akan penggunaan dana tersebut. Bagi orang tua yang peduli akan pendidikan anaknya pasti akan membelanjakan dana yang diberikan bagi kepentingan pendidikan anaknya. Tetapi bagi orang tua siswa yang tidak peduli akan pendidikan anaknya dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan anaknya.

Inilah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian mengenai masalah ini, karena percuma saja kebijakan yang dibuat sebaikmungkin bahkan dengan dana yang besar tetapi dalam implementasinya belum efektif. Penulis ingin mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan program BSM yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas tidak efektif.

1.2. Fokus Penelitian

Memperhatikan banyak faktor yang mempengaruhi penyaluran BSM ini maka diperlukan suatu fokus penelitian agar penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak meluas dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana program BSM pada tingkat Sekolah Dasar di SDN 16 Saing Rambi, SDN 20 Desa Kampung Lorong, dan SDN 12 Sungai Pinang Kecamatan Sambas.

1.3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang ada, agar penelitian yang dilakukan dapat dipahami dengan baik, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program BSM- SD Kecamatan Sambas.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kecamatan Sambas.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menyumbangkan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan membantu pembaca dalam mengetahui hal-hal yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Serta membantu bagi peneliti lain dalam penelitian sejenis lebih mendalam.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sambas sebagai instansi pelaksana kebijakan dalam Mengimplementasikan suatu kebijakan agar kebijakan yang telah dijalankan efektif dan tepat sasaran.